

Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure: Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19

Ni Made Sandyarani Dwi Nantari¹
I Putu Sudana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: nantaridwi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) melalui ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional pada *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. CSR diukur berdasarkan GRI Standards. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 dengan 104 amatan. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan *software* Eviews. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada CSR saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 yang mendukung teori keagenan dan *economics of information*, sementara proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada CSR saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Perusahaan perlu meningkatkan intensitas CSR, khususnya pada topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*; Pengungkapan; *Good Corporate Governance*; GRI Standards.

Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Before and During The Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of *Good Corporate Governance* (GCG) through the board of commissioners, the board of independent commissioners, managerial ownership, and institutional ownership on *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) before and during the Covid-19 pandemic. CSR is measured based on GRI Standards. The sample used is Energy sector companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2021 with 104 observations. Data were analyzed using panel data regression with Eviews software. The research results show that the board of commissioners has a positive effect on CSR before and during the Covid-19 pandemic which supports agency theory and the economics of information, while the board of independent commissioners, managerial ownership, and institutional ownership have no effect on CSR before and during the Covid-19 pandemic. Practically, companies need to increase CSR intensity, especially on economic, environmental and social topics.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*; Disclosure; *Good Corporate Governance*; GRI Standards.



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 4
Denpasar, 28 April 2024
Hal. 919-934

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i04.p07

PENGUTIPAN:

Nantari, N. M. S. D., &
Sudana, I. P. (2024). *Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure: Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19*. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 919-934

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
4 Juni 2023
Artikel Diterima:
11 Agustus 2023

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Undang-undang tersebut juga mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan aktivitas CSR. Namun, item-item pengungkapannya belum diatur secara rinci sehingga pelaksanaan aktivitas CSR dan intensitas pengungkapan pada setiap perusahaan menjadi berbeda (Indraswari & Mimba, 2017). CSRD akan membuat perusahaan mendapat citra baik karena CSRD di Indonesia masih bersifat sukarela sesuai dengan preferensi perusahaan (Nawang Sari *et al.*, 2021).

CSRD yang masih bersifat sukarela juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Hubungan perusahaan dengan pemegang saham akan lebih bermakna selama masa krisis dibandingkan saat keadaan normal (Putra *et al.*, 2022). Perusahaan perlu memberikan pertanggungjawaban bukan hanya terkait kinerja ekonomi, tetapi juga kinerja sosial dan lingkungan (Sudana, 2015). Hasil penelitian Albuquerque *et al.* (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan skor CSR tinggi memiliki performa harga saham yang lebih baik pada kuartal pertama tahun 2020 saat pandemi Covid-19 dimulai. Putra *et al.* (2022) menemukan bahwa CSRD saat sebelum dengan selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 12,22%. Baatwah *et al.* (2022) juga menemukan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan yang cukup besar dalam penganggaran dan pengeluaran aktivitas CSR. Perusahaan menjadi lebih inisiatif dalam melaksanakan aktivitas CSR pada masa krisis yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian (Mahmud *et al.*, 2021).

CSRD sehubungan dengan teori keagenan diperlukan guna meminimalisir masalah asimetri informasi yang terjadi antara agen sebagai penerima amanat dan prinsipal sebagai pemberi amanat. Teori keagenan berasumsi bahwa agen (manajemen perusahaan) tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal (pemegang saham) karena kedua pihak merupakan pemaksimal utilitas (Jensen & Meckling, 1976). CSRD dapat mengurangi asimetri informasi karena merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkap informasi mengenai aktivitas CSR yang dilakukan. Konsep *economics of information* memberikan pandangan bahwa informasi dapat memengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham karena memiliki nilai ekonomi di dalamnya (Stiglitz, 2017). Pandangan tersebut juga didukung asumsi munculnya masalah keagenan menurut Eisenhardt (1989), khususnya terkait dengan asumsi bahwa informasi adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi. Kurangnya informasi yang dimiliki pihak tertentu dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan nilai (Akerlof, 1970). CSRD membuat prinsipal memiliki informasi aktivitas CSR yang bisa menekan oportunistik agen Eisenhardt (1989).

Pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan akan didorong oleh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan *The Indonesia Corporate Governance Manual* (2014) disebutkan bahwa *corporate governance* adalah sistem hubungan yang ditentukan oleh struktur dan proses. Sistem hubungan yang

dimaksud adalah hubungan antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Aktivitas CSR meliputi upaya pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan (Sabatini & Sudana, 2019). Organ perusahaan yang menjadi pelaksana dari prinsip-prinsip tata kelola yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan akan mendorong terpenuhinya kebutuhan pemegang saham terhadap informasi aktivitas CSR perusahaan dengan didukung mekanisme GCG lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan proksi ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional yang diprediksi dapat mendorong intensitas CSRD.

Dewan komisaris merupakan organ pengawasan di perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat terkait aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh direksi (KNKG, 2021). Ukuran dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang adalah dua orang yang salah satunya merupakan dewan komisaris independen, dalam hal ukuran dewan komisaris hanya terdiri dari dua orang. Semakin banyak ukuran dewan komisaris maka komposisi pengalaman dan keahliannya akan semakin meningkat (Novianti & Eriandani, 2022). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar juga mengindikasikan bahwa organ perusahaan ini akan mewakili keberagaman pemegang saham perusahaan sehingga transparansi CSRD dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan terpisah untuk memenuhi kewajiban perusahaan akan semakin dimaksimalkan (Dias *et al.*, 2017).

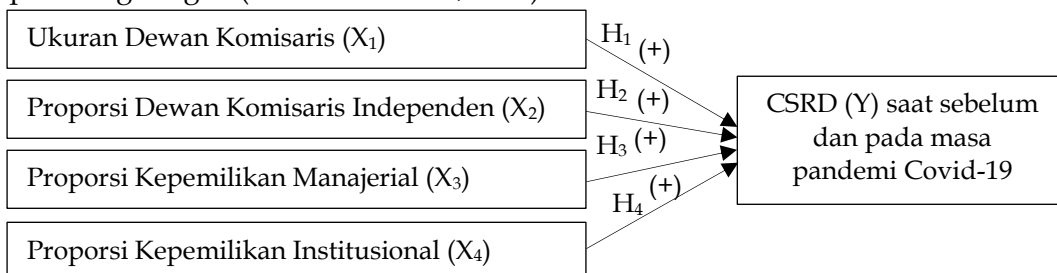
Pada komposisi dewan komisaris, terdapat dewan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan perusahaan tersebut atau dengan kata lain tidak berasal dari pihak terafiliasi (KNKG, 2021). Dewan komisaris independen yang memiliki profesionalisme tinggi akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan perusahaan dan juga pemegang sahamnya (Mahrani & Soewarno, 2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan proporsi dewan komisaris independen adalah minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang besar akan memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada manajemen dalam pengelolaan perusahaan, termasuk mengenai CSRD.

Mekanisme GCG lain yang diprediksi dapat memengaruhi CSRD adalah proporsi kepemilikan manajerial. Proporsi kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris (Widhiadnyana & Ratnadi, 2019). Proporsi kepemilikan manajerial yang besar akan semakin menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga tidak ada alasan bagi manajemen untuk menutupi informasi kepada pemegang sahamnya. Perilaku oportunistik manajer yang sering kali dilindungi oleh asimetri informasi dapat diminalisir dengan proporsi kepemilikan manajerial (Shan *et al.*, 2021). Penelitian oleh Ongsakul *et al.* (2021) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan manajerial yang besar akan semakin meningkatkan intensitas CSRD saat terjadi ketidakpastian ekonomi seperti saat krisis akibat pandemi Covid-19.

Proporsi kepemilikan institusional juga merupakan mekanisme GCG yang dapat mendorong CSRD perusahaan. Proporsi kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak yang berbentuk lembaga, seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lembaga lainnya (Nurleni *et al.*, 2018). Proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer (Tarigan & Adisaputra, 2020). Investor institusional dianggap lebih menyadari adanya masalah keagenan karena memiliki pengetahuan, sistem informasi, dan sumber daya yang lebih baik sehingga CSRD menjadi salah satu komponen dalam pengawasan (Krisna & Suhardianto, 2016).

Dias *et al.* (2017) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada CSRD, sementara Krisna & Suhardianto (2016) menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan CSRD. Proporsi dewan komisaris independen juga menunjukkan pengaruh berbeda pada CSRD dalam penelitian Tarigan & Adisaputra (2020) dengan pengaruh positif signifikan, sementara kedua variabel tersebut ditunjukkan tidak memiliki hubungan pada penelitian Herdi & NR (2020). Terkait proporsi kepemilikan manajerial, hasil penelitian Arikarsita & Wirakusuma (2020) menemukan hubungan positif antara proporsi kepemilikan manajerial pada CSRD, tetapi tidak menunjukkan hubungan signifikan pada hasil penelitian Sari & Handini (2021). Penelitian Nurleni *et al.* (2018) mendapatkan hasil bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif pada CSRD. Namun, Habbash (2016) menemukan bahwa proporsi kepemilikan institusional justru tidak berpengaruh pada CSRD. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional pada CSRD dengan menggunakan periode penelitian saat sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019) dan pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019) dan pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021). Sektor Energi berdasarkan Panduan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) adalah perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan yang menyediakan jasa pendukung dalam kegiatannya untuk menjual produk dan jasa berkaitan dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan serta energi alternatif. Perusahaan sektor Energi merupakan perusahaan *high profile* yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi pada lingkungan (Yulia & Afrianti, 2014).



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada tindakan direksi dalam mengelola perusahaan (Firmansyah *et al.*, 2020). Berdasarkan teori keagenan, pengawasan dari dewan komisaris dapat meningkatkan intensitas CSRD sehingga bisa mengurangi asimetri informasi. *Economics of information* menyatakan bahwa informasi tersebut perlu diungkap karena memiliki nilai ekonomi (Stiglitz, 2017). Dias *et al.* (2017), Tarigan & Adisaputra (2020), Thasya *et al.* (2020), Herizona & Yuliana (2021), serta Novianti & Eriandani (2022) menemukan semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan berpengaruh positif pada intensitas CSRD. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Pengawasan terhadap CSRD perusahaan juga akan dimaksimalkan oleh dewan komisaris independen. Berdasarkan teori keagenan, asimetri informasi akan diminimalisir dengan CSRD sehingga pemegang saham juga memiliki informasi tentang aktivitas CSR perusahaan. Dewan komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dapat mengawasi kinerja manajemen terkait CSRD yang meminimalisir adanya masalah asimetri informasi (Hien & Hai, 2020). Tarigan & Adisaputra (2020), [Fitriyah \(2020\)](#), [Putri & Fanggidae \(2021\)](#), Herizona & Yuliana (2021), [serta](#) Novianti & Eriandani (2022) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen dapat berpengaruh positif pada intensitas CSRD. Maka, hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.

H₂: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut teori keagenan, proporsi kepemilikan manajerial yang terdapat di perusahaan membuat manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan kondisi asimetri informasi dapat ditekan melalui CSRD yang sesuai dengan konsep *economics of information* bahwa informasi memiliki nilai ekonomi sehingga perlu diungkapkan. Penelitian Wulandari & Sudana (2018), Singal & Putra (2019), Arikarsita & Wirakusuma (2020), Tarigan & Adisaputra (2020), [Saleh & Yenti \(2022\)](#) mendapatkan hasil bahwa proporsi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif pada CSRD. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Proporsi kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan pada kinerja manajemen dalam mengungkapkan aktivitas CSR perusahaan. Pengawasan yang besar dari pihak investor institusi dapat menekan asimetri informasi berdasarkan teori keagenan. Pengungkapan informasi berdasarkan *economics of information* perlu dilakukan agar pemegang saham dapat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusannya. Pengaruh positif dari pengawasan investor institusi melalui kepemilikan institusional pada CSRD diperoleh pada hasil penelitian Sukasih & Sugiyanto (2017), Edison (2017), Nurleni *et al.* (2018), Singal & Putra (2019), serta Sari & Handini (2021). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₄: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonpartisipan dengan data sekunder. Data variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 dikumpulkan melalui laporan tahunan. Khusus pada variabel CSRD, data dikumpulkan melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan terpisah. Apabila laporan keberlanjutan terpisah perusahaan tidak dapat diakses, maka data CSRD hanya dikumpulkan melalui laporan tahunan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Sampel penelitian diseleksi dengan teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 26 perusahaan dengan total 104 amatan selama periode 2018-2021. Penentuan sampel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor Energi terdaftar BEI selama periode 2018-2021	62
2	Perusahaan sektor Energi yang laporan tahunan atau laporan keberlanjutan terpisah selama periode 2018-2021 tidak dapat diakses	(8)
3	Perusahaan sektor Energi yang tidak menampilkan informasi proporsi kepemilikan manajerial dan proporsi kepemilikan institusional selama periode 2018-2021	(28)
Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel		26
Jumlah amatan selama 4 tahun periode penelitian		104

Sumber: Data penelitian, 2022

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSRD. Variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris (X_1), proporsi dewan komisaris independen (X_2), proporsi kepemilikan manajerial (X_3), dan proporsi kepemilikan institusional (X_4).

CSRD didefinisikan sebagai tindakan perusahaan dalam memberikan informasi tentang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosialnya melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan terpisah (Sadou *et al.*, 2017). CSRD pada penelitian ini diukur dengan mengacu pada *Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards)* yang terdiri dari 149 indikator yang harus diungkapkan perusahaan. Indikator tersebut meliputi Landasan (GRI 101), Pengungkapan Umum (GRI 102), dan Pendekatan Manajemen (GRI 103) serta pengungkapan topik spesifik dalam seri 200 (ekonomi), seri 300 (lingkungan), dan seri 400 (sosial). Perhitungan dilakukan dengan membagi total indikator pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan yang seharusnya diungkapkan. Setiap indikator yang diungkapkan masing-masing akan diberikan skor 1 dan apabila tidak diberi skor 0. Adapun rumus untuk menghitung CSRD, yaitu:

$$CSRD_i = \frac{\text{Jumlah indikator yang diungkap perusahaan}}{\text{Jumlah indikator yang seharusnya diungkap perusahaan}} \dots \dots \dots (1)$$

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sebagai organ yang mengelola perusahaan (KNKG, 2021). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah personal yang menduduki jabatan sebagai dewan komisaris pada setiap perusahaan (Firmansyah *et al.*, 2020). Menurut Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ukuran dewan komisaris minimal adalah dua orang. Pengukuran ukuran dewan komisaris, yaitu:

$$UDKM_i = \text{Jumlah dewan komisaris perusahaan} \dots \dots \dots (2)$$

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan pihak manajemen (KNKG, 2021). Proporsi dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dibanding dengan jumlah dewan komisaris perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris independen perusahaan wajib paling kurang 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Pengukuran proporsi dewan komisaris independen, yaitu:

$$PDKI_i = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen perusahaan}}{\text{Jumlah dewan komisaris perusahaan}} \dots \dots \dots (3)$$

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pihak manajemen yaitu dewan komisaris dan dewan direksi memiliki saham perusahaan (Edison, 2017). Proporsi kepemilikan manajerial menunjukkan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Pengukuran proporsi kepemilikan manajerial dalam penelitian ini, yaitu:

$$PKMJ_i = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan}}{\text{Jumlah saham perusahaan yang beredar}} \dots \dots \dots (4)$$

Proporsi kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh investor berbentuk institusi, seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perseroan terbatas, dan institusi lain (Nurleni *et al.*, 2018). Proporsi kepemilikan institusional adalah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Pengukuran proporsi kepemilikan institusional, yaitu:

$$PKIN_i = \frac{\text{Jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusi}}{\text{Jumlah saham perusahaan yang beredar}} \dots \dots \dots (5)$$

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan *software* Eviews. Pengujian meliputi pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t) yang dilakukan dua kali untuk periode sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Secara umum, persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan:

Y = *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Ukuran dewan komisaris

X_2 = Proporsi dewan komisaris independen

X_3 = Proporsi kepemilikan manajerial

X_4 = Proporsi kepemilikan institusional

ε = *Error terms*

i = Individu atau perusahaan

t = Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menyajikan informasi setiap variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil analisis menggunakan *software* Eviews, seperti menggambarkan jumlah sampel yang digunakan, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif saat sebelum pandemi Covid-19 (t_{-1}) dan pada masa pandemi Covid-19 (t_0) serta rata-rata per tahun setiap variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif saat Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19

	N	CSRD		UDKM		PDKI		PKMJ		PKIN	
		t_{-1}	t_0	t_{-1}	t_0	t_{-1}	t_0	t_{-1}	t_0	t_{-1}	t_0
<i>Mean</i>	52	0,33	0,44	4,31	4,17	0,42	0,43	0,03	0,03	0,83	0,82
<i>Maximum</i>	52	0,69	0,84	8,00	8,00	0,67	0,67	0,21	0,22	0,99	0,99
<i>Minimum</i>	52	0,15	0,15	2,00	2,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,41	0,38
<i>Std. Dev.</i>	52	0,15	0,20	1,55	1,65	0,10	0,08	0,06	0,05	0,15	0,17
<i>Mean (2018)</i>	26	0,31		4,27		0,42		0,03		0,83	
<i>Mean (2019)</i>	26	0,35		4,35		0,41		0,03		0,83	
<i>Mean (2020)</i>	26		0,38		4,19		0,42		0,03		0,82
<i>Mean (2021)</i>	26		0,50		4,15		0,43		0,03		0,82

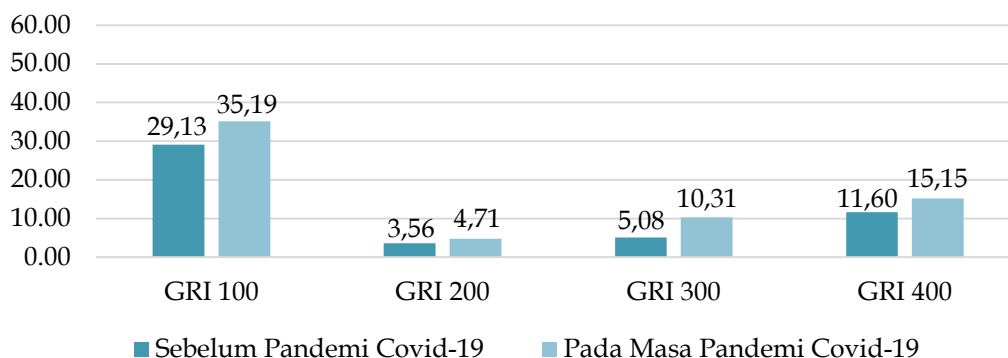
Sumber: Data Penelitian, 2023

CSRD saat sebelum pandemi Covid-19 dengan pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan pada rata-rata dari 0,33 menjadi 0,44. Dapat dilihat pula pada rata-rata tahunan CSRD yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021. Perubahan yang cukup besar terjadi pada nilai rata-rata CSRD dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang merupakan masa pandemi Covid-19 dengan peningkatan sebesar 0,11 atau 11%. CSRD dapat menjadi strategi untuk meningkatkan citra perusahaan saat keadaan krisis seperti pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan semakin menyadari pentingnya CSRD dalam menjaga hubungan dengan pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris (UDKM) dan proporsi dewan komisaris (PDKI) telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Ukuran dewan komisaris perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 2. Ukuran tersebut sudah memenuhi ukuran minimum dewan komisaris yang wajib terdapat dalam perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan proporsi dewan komisaris independen yang memiliki nilai minimal 0,33 atau 33%. Proporsi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris independen wajib minimal 30% dari total dewan komisaris perusahaan.

Kepemilikan manajerial (PKMJ) saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 tidak menunjukkan perubahan berdasarkan rata-rata per tahunnya. Namun, standar deviasi pada kedua periode yang masing-masing sebesar 0,06 dan 0,05 nilainya lebih besar daripada rata-rata sebesar 0,03 pada kedua periode. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata tersebut menunjukkan variasi antara nilai maksimum dan minimum yang besar. Kepemilikan institusional (PKIN) menunjukkan sebaliknya, yaitu standar deviasi pada kedua periode yang masing-masing bernilai 0,15 dan 0,17 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,83 dan 0,82

saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang besar antara nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai rata-rata proporsi kepemilikan institusional tidak menunjukkan perbedaan yang besar saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.



Gambar 2. Rata-Rata CSRD Berdasarkan GRI Standards

Sumber: Data Penelitian, 2023

Rata-rata CSRD berdasarkan GRI Standards yang dilakukan perusahaan sektor Energi yang dijadikan sebagai sampel penelitian pada saat sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019) dan pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) juga disajikan dalam penelitian ini, yaitu pada Gambar 2. Jumlah pengungkapan maksimal pada GRI 100 adalah 60 indikator, pada GRI 200 adalah 17 indikator, GRI 300 adalah 32 indikator, dan GRI 400 adalah 40 indikator. Terjadi peningkatan pada setiap pengungkapan seri GRI saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Intensitas CSRD paling banyak adalah pada pengungkapan GRI 100 mengenai standar universal. Dibandingkan pengungkapan topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, perusahaan justru lebih banyak mengungkapkan standar universal seputar landasan, profil organisasi, strategi, etika dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, praktik pelaporan, dan pendekatan manajemen.

Model regresi data panel yang dapat berupa *common effects model* (CEM), *fixed effects model* (FEM), dan *random effects model* (REM) dipilih salah satunya dengan menggunakan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Dari hasil ketiga uji tersebut, model regresi data panel yang lebih tepat untuk digunakan adalah REM, baik pada periode sebelum pandemi Covid-19 dan juga pada masa pandemi Covid-19. Dikarenakan REM terpilih sebagai model regresi yang lebih tepat, maka uji heteroskedastisitas tidak diperlukan karena model tersebut menggunakan metode *generalized least square* (GLS) yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas (Gujarati & Porter, 2009: 375). Selain itu, penelitian ini menggunakan data *micro panel* sehingga masalah otokorelasi menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan (Algifari, 2021: 51). Uji asumsi klasik yang diperlukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas.

Pada model regresi sebelum pandemi Covid-19, residual data tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan transformasi data ke dalam bentuk *log* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model regresi pada masa pandemi Covid-19 didapatkan hasil uji bahwa residual data sudah berdistribusi normal. Berdasarkan uji yang dilakukan, tidak terdapat masalah multikolinearitas pada kedua model regresi, yaitu sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 3. Hasil Regresi REM saat Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19

Variable	Sebelum Pandemi Covid-19				Pada Masa Pandemi Covid-19			
	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.
(Constant)	-2,189	0,411	-5,322	0,000	0,326	0,285	1,145	0,258
UDKM	0,503	0,203	2,472	0,017	0,054	0,019	2,807	0,007
PDKI	-0,159	0,292	-0,544	0,589	0,046	0,344	0,133	0,895
PKMJ	-0,024	0,29	-0,826	0,413	-0,549	0,690	-0,796	0,430
PKIN	-0,079	0,356	-0,223	0,824	-0,138	0,222	-0,622	0,537
Adjusted R ²	0,112				0,088			
Prob(F-statistic)					0,048			
					0,080			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R²* pada sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0,112 berarti 11,2% variasi variabel CSRD dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Variasi variabel CSRD sebesar 88,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Pada masa pandemi Covid-19, nilai *adjusted R²* adalah sebesar 0,080. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 8% variasi variabel CSRD dipengaruhi oleh empat variabel dalam model regresi dan 92% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai *Prob(F-statistic)* pada model regresi sebelum pandemi Covid-19 adalah 0,048 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan begitu disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel CSRD. Pada model regresi masa pandemi Covid-19, nilai *Prob(F-statistic)* ditunjukkan sebesar 0,080. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga disimpulkan variabel independen secara simultan tidak berpengaruh pada variabel CSRD.

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelum pandemi Covid-19, variabel ukuran dewan komisaris (UDKM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,503 dengan probabilitas uji t sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Pada hasil analisis regresi masa pandemi Covid-19, variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,054 dengan probabilitas uji t sebesar 0,007 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan pada variabel CSRD saat sebelum dan juga pada masa pandemi Covid-19. Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa Covid-19 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Dias *et al.* (2017), Tarigan & Adisaputra (2020), serta Novianti & Eriandani (2022), tetapi tidak selaras dengan penelitian Krisna & Suhardianto (2016) serta Fitriyah (2020). Teori keagenan yang menunjukkan bahwa pengawasan dari dewan komisaris bisa meminimalisir asimetri informasi dengan pengungkapan informasi aktivitas CSR tercermin dalam hasil penelitian ini. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan membuat pengawasan menjadi lebih ketat sehingga bisa mengurangi tindakan menyimpang dari manajemen sehubungan dengan kontrak keagenan antara manajemen dan pemegang saham terkait pengungkapan informasi aktivitas CSR.

Proporsi dewan komisaris independen (PDKI) pada hasil analisis regresi saat sebelum pandemi Covid-19 memiliki koefisien regresi sebesar $-0,159$ dengan probabilitas uji t sebesar $0,589$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi $0,05$. Pada hasil analisis regresi masa pandemi Covid-19, proporsi komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar $0,046$ dengan probabilitas uji t sebesar $0,895$. Hasil uji t saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel CSRD. Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung teori keagenan bahwa pengawasan dari dewan komisaris independen dapat meningkatkan CSRD perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen yang terdapat di perusahaan tidak dapat menjalankan perannya untuk memberikan pengawasan pada manajemen terkait dengan pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas CSR perusahaan (Herdi & NR, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Dias *et al.* (2017), Widyastari & Sari (2018), serta Herdi & NR (2020), tetapi tidak sejalan dengan penelitian Tarigan & Adisaputra (2020) serta Putri & Fanggidae (2021).

Hasil analisis regresi pada sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan koefisien regresi variabel proporsi kepemilikan manajerial (PKMJ) sebesar $-0,024$ dengan probabilitas uji t sebesar $0,413$. Proporsi kepemilikan manajerial pada hasil analisis regresi saat pandemi Covid-19 memiliki koefisien regresi sebesar $-0,549$ dengan probabilitas uji t sebesar $0,430$. Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi $0,05$ saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 sehingga variabel proporsi kepemilikan manajerial disimpulkan tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel CSRD. Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat meminimalisir asimetri informasi. CSRD dapat mengatasi masalah asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham seputar informasi aktivitas CSR. Proporsi kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajemen belum dapat memaksimalkan CSRD. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Salehi *et al.* (2017), Andriani & Sudana (2023), serta Sari & Handini (2021). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil pada penelitian oleh Wulandari & Sudana (2018), Arikarsita & Wirakusuma (2020), serta Tarigan & Adisaputra (2020).

Proporsi kepemilikan institusional (PKIN) pada hasil analisis regresi sebelum pandemi Covid-19 memiliki koefisien regresi sebesar $-0,079$ dengan nilai probabilitas uji t sebesar $0,824$ yang lebih besar dari tingkat signifikansi $0,05$. Pada hasil regresi masa pandemi Covid-19, proporsi kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar $-0,138$ dengan probabilitas uji t sebesar $0,537$ yang lebih besar daripada tingkat signifikansi $0,05$. Hasil tersebut menunjukkan variabel proporsi kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung teori keagenan bahwa pengawasan dari proporsi kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan CSRD. Tidak adanya hubungan

antara proporsi kepemilikan institusional dengan CSRD menunjukkan bahwa investor institusi tidak begitu memerhatikan CSRD dan tidak menggunakannya sebagai sumber informasi dalam membuat keputusan (Salehi *et al.*, 2017). Masih rendahnya rata-rata CSRD perusahaan yang disajikan pada Tabel 2 menggambarkan bahwa CSRD bukan merupakan fokus pengawasan dari investor institusi sehingga besar atau kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak akan berpengaruh pada CSRD. Hasil pada penelitian ini tidak mendukung penelitian Sukasih & Sugiyanto (2017), Nurleni *et al.* (2018), serta Sari & Handini (2021), tetapi sebaliknya mendukung penelitian oleh Habbash (2016), Salehi *et al.* (2017), serta Putri & Badera (2022).

SIMPULAN

Ukuran dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka intensitas CSRD perusahaan juga akan semakin meningkat pada kedua periode tersebut. Proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada CSRD saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Hasil ini bermakna bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional tidak akan berpengaruh pada intensitas CSRD, baik saat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dengan begitu, hasil penelitian tidak mendukung teori keagenan bahwa proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial, dan proporsi kepemilikan institusional bisa mengurangi asimetri informasi melalui CSRD.

Perusahaan dapat lebih memaksimalkan CSRD dalam laporan tahunan atau pada laporan keberlanjutan terpisah setiap tahunnya, terutama pada topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan empat variabel dan menemukan bahwa hanya variabel ukuran dewan komisaris yang berpengaruh pada CSRD. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai berbagai faktor seputar keberagaman dewan komisaris, seperti *gender*, pendidikan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya untuk mengetahui komposisi dewan komisaris mana yang dapat meningkatkan intensitas CSRD. Penelitian ini juga terbatas pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di BEI. Peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menganalisis CSRD perusahaan sektor lain di BEI sehingga dapat diketahui intensitas CSRD pada sektor lainnya.

REFERENSI

- Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84 (3), pp. 488-500. <https://doi.org/10.2307/1879431>.
- Albuquerque, R., Koskinen, Y., Yang, S., & Zhang, C. (2020). Resiliency of Environmental and Social Stocks: An Analysis of the Exogenous COVID-19 Market Crash. *The Review of Corporate Finance Studies*, 9 (3), pp. 593-621. <https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa011>.
- Algifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Andriani, N. P. M., & Sudana, I. P. (2023). Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional pada Corporate Social Responsibility Disclosure dengan Kinerja Lingkungan sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33 (1), pp. 59-72. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i01.p05>.
- Arikarsita, N. W., & Wirakusuma, M. G. (2020). Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajemen, Media Exposure dan Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (12), pp. 3096-3109. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i12.p08>.
- Baatwah, S. R., Al-Qadasi, A. A., Al-Shehri, A. M., & Derouiche, I. (2022). Corporate social responsibility budgeting and spending during COVID-19 in Oman: A humanitarian response to the pandemic. *Finance Research Letters*, 47, pp. 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102686>.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). *Panduan IDX Industrial Classification*. Januari. Bursa Efek Indonesia. Jakarta.
- Dias, A. (2017). Corporate Governance Effects on Social Responsibility Disclosures. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11 (2), pp. 3-22. <https://doi.org/10.14453/aabf.v11i2.2>.
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *BISMA*, 11 (2), pp. 164-175. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14 (1), pp. 57-74. <https://doi.org/10.2307/258191>.
- Firmansyah, D., Surasni, N. K., & Pancawati, S. (2020). Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (1), pp. 163-178. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p12>.
- Fitriyah, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Earnings Management dengan Variabel CSR sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4 (2), pp. 178-191. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i2.116>.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Habbash, M. (2016). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: evidence from Saudi Arabia. *Social Responsibility Journal*, 12 (4), pp. 740-754. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2015-0088>.
- Herdi, F., & NR, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2 (1), pp. 2428-2444. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.221>.
- Herizona, B. S., & Yuliana, I. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10 (1), pp. 108-128. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i1.2935>.
- Hien, H. N., & Hai, P. D. (2020). The Theories of Corporate Governance and

- Suggested Solutions to Its Legislation Completion in Vietnam. *International Journal of Management*, 11 (12), pp. 12–19. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.002>.
- Indraswari, I. G. A. L., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Kapitalisasi Pasar dan Kepemilikan Saham Publik pada Tingkat Pengungkapan CSR. *E-Jurnal Akuntansi*, 20 (2), pp. 1219–1248. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p13>.
- International Finance Corporation. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition*. Januari. IFC Advisory Services in Indonesia. Jakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), pp. 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021*. Desember. Komite Nasional Kebijakan Governansi. Jakarta.
- Krisna, A. D., & Suhardianto, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18 (2), pp. 119–127. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>.
- Mahmud, A., Ding, D., & Hasan, M. M. (2021). Corporate Social Responsibility: Business Responses to Coronavirus (COVID-19) Pandemic. *SAGE Open*, 11 (1), pp. 1–17. <https://doi.org/10.1177/2158244020988710>.
- Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian Journal of Accounting Research*, 3 (1), pp. 41–60. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008>.
- Nawang Sari, A. T., Junjuran, M. I., & Buchori, I. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21 (2), pp. 211–227. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.685>.
- Novianti, N., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 18 (1), pp. 208–216. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i1.10375>.
- Nurleni, N., Bandang, A., Darmawati, D., & Amiruddin, A. (2018). The effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure. *International Journal of Law and Management*, 60 (4), pp. 979–987. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0078>.
- Ongsakul, V., Jiraporn, P., & Treepongkaruna, S. (2021). Does managerial ownership influence corporate social responsibility (CSR)? The role of economic policy uncertainty. *Accounting & Finance*, 61 (1), pp. 763–779. <https://doi.org/10.1111/acfi.12592>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (2014). Indonesia.
- Putra, K. S. H., Wahyuni, E. T., & Fitrijanti, T. (2022). Financial Distress, Size, Age, and Corporate Social Responsibility Disclosure: Empirical Study from Indonesia Before and During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1), pp. 73–88.

- <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.24590>.
- Putri, I. G. A. M. A. D., & Badera, I. D. N. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 32 (12), pp. 3692-3703. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i12.p15>.
- Putri, T. Y. M., & Fanggidae, P. Y. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Corporate Social Responsibility. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2), pp. 95-106. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.95-106>.
- Sabatini, K., & Sudana, I. P. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14 (1), pp. 56-69. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i01.p06>.
- Sadou, A., Alom, F., & Laluddin, H. (2017). Corporate social responsibility disclosures in Malaysia: evidence from large companies. *Social Responsibility Journal*, 13 (1), pp. 177-202. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2016-0104>.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Rezanezhad, M. (2017). The relationship between board of directors' structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure. *Humanomics*, 33 (4), pp. 398-418. <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0022>.
- Sari, P. A., & Handini, B. T. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12 (2), pp. 102-115. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.10882>.
- Shan, Y. G., Tang, Q., & Zhang, J. (2021). The impact of managerial ownership on carbon transparency: Australian evidence. *Journal of Cleaner Production*, 317, pp. 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128480>.
- Singal, P. A., & Putra, I. N. W. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 29 (1), pp. 468. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p30>.
- Stiglitz, J. (2017). *The Revolution of Information Economics: The Past and the Future*. <https://doi.org/10.3386/w23780>.
- Sudana, I. P. (2015). Sustainable Development and Reconceptualization of Financial Statements. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, pp. 157-162. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.023>.
- Sukasih, A., & Sugiyanto, E. (2017). Pengaruh Struktur Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2 (2), pp. 121-131. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4894>.
- Tarigan, Y., & Adisaputra, D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 8 (2), pp. 163-170. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i2.2089>.
- Thasya, N., Lisah, L., Angelina, A., Gozal, N., Veronica, V., & Rahmi, N. U. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi. *Jurnal Samudra*

- Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), pp. 69–82.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1764>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2007). Indonesia.
- Widhiadnyana, I. K., & Dwi Ratnadi, N. M. (2019). The impact of managerial ownership, institutional ownership, proportion of independent commissioner, and intellectual capital on financial distress. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21 (3), pp. 351–360.
<https://doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1233>.
- Widyastari, N. K. W., & Ratna Sari, M. M. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 22 (3), pp. 1826–1856. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p07>.
- Wulandari, A. A. A. I., & Sudana, I. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajemen, dan Leverage Pada Intensitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 22 (2), pp. 1445–1472. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p23>.
- Yulia, A., & Afrianti, A. (2014). Analisis Perbedaan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile dan Low Profile (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (1), pp. 92–106.
<https://doi.org/10.24815/jdab.v1i1.3594>.